

## Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik



Hilda Lisa Amelia <sup>(1)</sup> Sjarief Hidajat <sup>(2\*)</sup>

<sup>(2\*)</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur", Indonesia

<sup>(1)</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur", Indonesia

Corresponding author. Sjarief Hidajat  
[sjariefhidajat.ak@upnjatim.ac.id](mailto:sjariefhidajat.ak@upnjatim.ac.id)

	Abstract
<p><b>Kata Kunci:</b> partisipasi; transparansi; akuntabilitas; kinerja keuangan; pemerintahan daerah.</p> <p><b>Pernyataan Penulis:</b> Penulis (penulis) menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.</p> <p>Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.</p>	<p><b>Tujuan:</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pada instansi pelayanan publik. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan pengelolaan keuangan publik, khususnya pada institusi pemerintah daerah.</p> <p><b>Desain Penelitian dan Metodologi:</b> Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada pegawai dari tiga instansi yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik Siola Kota Surabaya, yaitu DINKOPUMDAG, DISBUDPORAPAR, dan DPMPPTSP. Penelitian ini menganalisis hubungan antara variabel tata kelola dan kinerja keuangan menggunakan indikator kinerja sektor publik.</p> <p><b>Hasil dan Pembahasan:</b> Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan publik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas institusi berperan penting dalam mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p><b>Implikasi:</b> Penelitian ini mendorong penguatan praktik tata kelola berbasis kinerja dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, akses terhadap informasi, dan sistem akuntabilitas. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan manajer sektor publik dalam mengoptimalkan kerangka tata kelola keuangan.</p>

## Pendahuluan

Pemerintah sektor publik memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang maksimal. Kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik menjadi dasar legitimasi operasionalnya, sehingga penerapan tata kelola yang baik (good governance) merupakan suatu keharusan (Utami, 2023). Prinsip-prinsip utama good governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah seperti Kota Surabaya. Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah, bukan sebagai alat pencari keuntungan. Pengukuran kinerja menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah memenuhi kewajiban terhadap program yang telah direncanakan

(Moediono, 2022). Laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sarana utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian (Anggreani, 2023) dan (Simorangkir, 2021) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penggunaan anggaran publik. (Rahma et al., 2023) menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat atau partisipasi publik juga berperan penting dalam memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Prinsip ini memperkuat pengawasan sosial dan menjamin keterbukaan pemerintah terhadap kebijakan anggaran. Meski demikian, beberapa studi masih menunjukkan adanya keterbatasan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut, khususnya pada level pemerintahan daerah.

Kesenjangan praktik *good governance* di lingkungan dinas pemerintahan Kota Surabaya masih menjadi perhatian. Berdasarkan observasi awal, beberapa dinas seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DINKOPUMDAG), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISBUDPORAPAR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara terbuka. Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki akses langsung terhadap laporan keuangan ketiga dinas tersebut. Hal ini menimbulkan persepsi kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran juga dinilai masih rendah.

Minimnya akses publik terhadap laporan keuangan mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip transparansi, sementara tidak adanya pertanggungjawaban terbuka mencerminkan kurangnya akuntabilitas. Ketiga dinas yang diamati hanya menyediakan data pelaporan keuangan melalui sistem internal yang terbatas pada pegawai, sehingga publik tidak dapat mengevaluasi secara langsung efektivitas anggaran yang digunakan. Temuan ini menunjukkan adanya gap antara prinsip *good governance* yang seharusnya diterapkan dengan kondisi aktual di lapangan. Penelitian terdahulu umumnya menekankan pentingnya prinsip-prinsip *good governance*, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti implementasinya pada unit-unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah seperti Mall Pelayanan Publik Siola Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara empiris pengaruh partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pada tiga dinas yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik Siola Kota Surabaya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur *good governance* dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus empiris terhadap keterkaitan antara partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan akuntabilitas lembaga publik dengan kinerja keuangan pemerintah daerah secara langsung, yang selama ini masih jarang diteliti dalam konteks pelayanan publik terpadu di kota besar di Indonesia. Dengan mengidentifikasi kesenjangan implementasi prinsip tata kelola yang baik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar untuk perumusan kebijakan dan strategi peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat literatur mengenai *good governance*, tetapi juga memberikan solusi aplikatif bagi peningkatan kinerja keuangan sektor publik di daerah.

## **Ulasan Literatur**

### **Partisipasi**

Partisipasi masyarakat menjadi elemen vital dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. (Sari, 2020) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif

individu atau kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi tidak hanya melibatkan kehadiran fisik, tetapi juga kesadaran, sikap proaktif, kontribusi dalam bentuk pemikiran maupun tenaga, dan konsensus terhadap kebijakan. Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik.

Manfaat partisipasi terlihat dari peran masyarakat dalam memperbaiki kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Partisipasi dapat menjadi alat kontrol terhadap kebijakan yang tidak adil atau tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga memperkuat legitimasi pemerintah dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Sebagaimana disebutkan oleh Indriana & Nasrun (2019), partisipasi adalah salah satu prinsip *good governance* yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik harus terus didorong dan difasilitasi.

### Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Menurut (Khusaini, 2019), transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik, terutama mengenai kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran. Keterbukaan ini memungkinkan adanya pengawasan dari legislatif maupun masyarakat luas, sehingga pemerintah lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan keterbukaan informasi, potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran dapat ditekan secara signifikan. Humanitarian Forum Indonesia dalam (Simorangkir, 2021) merinci prinsip-prinsip transparansi yang mencakup ketersediaan informasi, publikasi kegiatan, pelaporan rutin, serta pemanfaatan media digital untuk penyebaran informasi. Transparansi juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas karena keduanya mendukung terciptanya hubungan horizontal antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat, maka kepercayaan terhadap pemerintah meningkat dan partisipasi dalam pengawasan pun semakin aktif. Dengan demikian, transparansi bukan hanya soal keterbukaan, tetapi juga tentang membangun hubungan timbal balik antara pemerintah dan publik.

### Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban moral dan administratif pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Mardiasmo (2021) menyebutkan bahwa akuntabilitas mencakup proses pelaporan yang transparan dan sistematis agar masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam menumbuhkan kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola yang kredibel. (Simorangkir, 2021) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi transparansi, kewajiban untuk menjawab (*responsibility*), kemampuan dikendalikan (*controllability*), dan tanggung jawab atas standar kinerja yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip ini memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah secara objektif, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program publik. Dalam kerangka teori keagenan, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa agen (pemerintah) bertindak sejalan dengan kepentingan prinsipal (masyarakat). Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas sangat penting guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat.

### Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara efisien dan efektif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006

menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dengan tolok ukur kuantitatif dan kualitatif. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi hasil dari setiap program berdasarkan APBN atau APBD (PP No. 8 Tahun 2006). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan instansi pemerintah menyusun strategi kinerja secara sistematis untuk memastikan ketercapaian tujuan organisasi jangka menengah dan panjang. Mardiasmo (2021) mengemukakan bahwa tujuan evaluasi kinerja keuangan meliputi peningkatan efektivitas kerja organisasi, efisiensi dalam alokasi sumber daya, serta peningkatan transparansi dan komunikasi antarlembaga. Evaluasi ini mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan anggaran. Indriana dan Nasrun (2019) menambahkan bahwa prinsip good governance, seperti akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan efektivitas, menjadi kunci utama dalam menciptakan kinerja keuangan yang sehat. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip ini perlu diperkuat dalam praktik tata kelola daerah untuk menjamin pengelolaan keuangan yang optimal.

### Teori Keagenan

Teori keagenan (agency theory) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Dalam konteks organisasi sektor publik, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah selaku agen untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Hubungan ini rentan terhadap konflik kepentingan karena agen memiliki informasi dan kendali yang lebih besar daripada prinsipal, sehingga menimbulkan masalah asimetri informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan agen bertindak sesuai kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dapat memperkecil kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal, serta mendorong akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintahan (Mardiasmo, 2021). Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik yang relevan, sehingga mampu menilai kinerja pemerintah secara objektif. Sementara itu, akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara jujur dan efisien. Ketiga variabel ini berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh agen. Penelitian terdahulu seperti oleh (Sari, 2020) menunjukkan bahwa partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan instansi pemerintah daerah.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan teori keagenan dan temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan, partisipasi publik diduga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena dapat menyalurkan aspirasi dan masukan terhadap kebijakan (Rahma et al., 2023). Transparansi diyakini mendorong efisiensi dan akuntabilitas yang berdampak pada perbaikan kinerja keuangan (Astuti et al., 2024). Akuntabilitas, sebagaimana ditegaskan oleh (Pera et al., 2024), menjadi dasar pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang berkontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan keuangan publik.

*H1: Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan*

*H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan*

*H3: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan*

## Desain Penelitian dan Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bertujuan menguji pengaruh antarvariabel secara statistik dan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan organisasi sektor publik. Desain ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya secara objektif

berdasarkan data numerik. Penelitian eksplanatif juga digunakan karena mampu memberikan penjelasan mengenai seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diukur secara langsung dari persepsi responden melalui instrumen terstandar. Objek penelitian dalam studi ini adalah variabel partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan. Sementara itu, subjek penelitian adalah para pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Mall Pelayanan Publik (MPP) Siola Kota Surabaya, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan; Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemilihan lokasi dan subjek dilakukan karena ketiga dinas tersebut menjalankan fungsi pelayanan publik secara langsung dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, sehingga relevan untuk meneliti keterkaitan antara partisipasi masyarakat, transparansi informasi publik, dan akuntabilitas internal dengan performa keuangan instansi.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 232 orang, yaitu seluruh pegawai PNS dari ketiga dinas. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria responden adalah:

- Merupakan PNS aktif di instansi terkait;
- Memiliki peran dalam pengelolaan keuangan atau termasuk dalam struktur inti organisasi (baik staf keuangan maupun non-keuangan);

Dari populasi tersebut, diperoleh sampel sebanyak 58 orang. Penentuan jumlah tersebut mempertimbangkan representasi dari masing-masing bidang agar mencerminkan baik sisi administratif keuangan maupun pelaksana teknis lapangan, sehingga hasil penelitian mampu menangkap realitas penerapan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas secara menyeluruh. Setiap bidang diambil rata-rata tiga responden sebagai bentuk triangulasi data dan pengayaan perspektif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner tertutup dalam bentuk cetak (fisik). Instrumen kuesioner dikembangkan berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian yang telah disusun dalam definisi operasional. Kuesioner berisi pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert lima poin, dengan rentang nilai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Penggunaan skala Likert dipilih karena sesuai untuk mengukur persepsi dan sikap responden terhadap fenomena-fenomena sosial yang bersifat subjektif, seperti transparansi dan akuntabilitas. Kuesioner dibagikan secara langsung oleh peneliti dan dikumpulkan kembali setelah diisi oleh responden, untuk memastikan tingkat respons dan keakuratan pengisian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui software SmartPLS. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antar variabel laten sekaligus dalam satu model dan tidak memerlukan asumsi distribusi normal serta cocok untuk jumlah sampel kecil hingga sedang.

Analisis dilakukan dalam dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Evaluasi outer model mencakup:

- Uji validitas konvergen dan diskriminan, untuk memastikan setiap indikator mengukur konstruk yang sesuai;
- Uji reliabilitas, menggunakan composite reliability untuk menilai konsistensi internal antar indikator.

Evaluasi inner model mencakup:

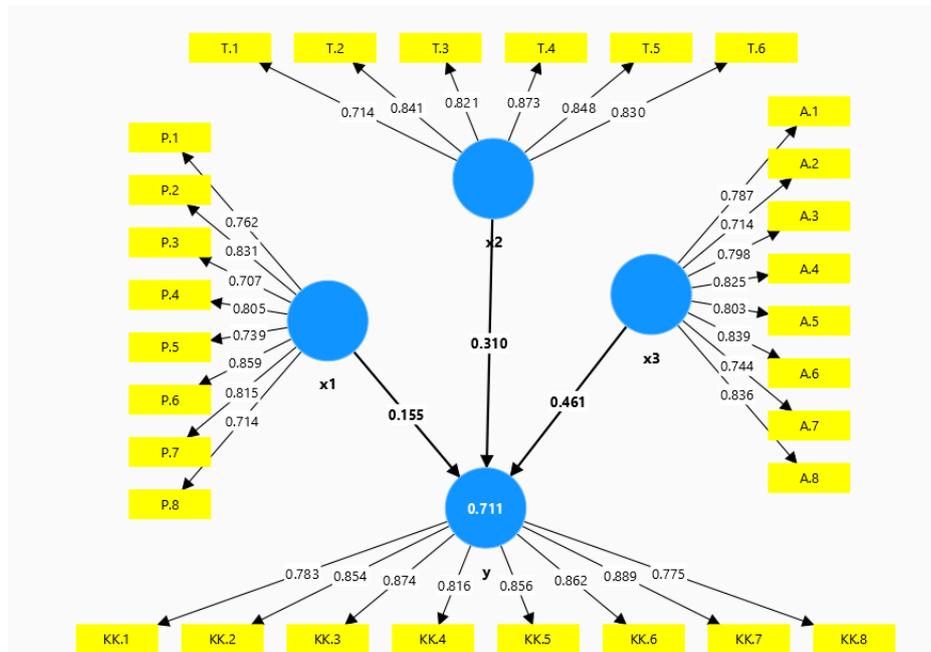
- Koefisien determinasi (R-squared) untuk mengukur kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen;
- Nilai t-statistik (t-values) dan nilai signifikansi melalui teknik bootstrapping, guna menguji hipotesis hubungan langsung antarvariabel dengan batas signifikansi 5% ( $t > 1,96$ ).

Selain hubungan langsung, model ini juga memungkinkan analisis pengaruh tidak langsung (mediasi), untuk menilai apakah suatu variabel menjadi perantara hubungan antara dua variabel lain.

Prosedur analisis dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam pemodelan SEM-PLS.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil



**Gambar 1 PLS Model**

*Sumber: Data Penelitian, 2025*

Panah yang menghubungkan variabel ke indikator terdapat nilai koefisien loading (loading coefficient) untuk setiap indikator, sebagaimana terlihat pada gambar 1 output PLS (Partial Least Squares). Nilai ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara indikator dan variabel yang diwakilinya. Besarnya koefisien jalur (path coefficient) juga ditampilkan dalam gambar tersebut, yang ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan variabel endogen dan variabel eksogen. Ini menggambarkan seberapa kuat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya.

Untuk variabel Partisipasi, indikator dengan nilai faktor muat (loading factor) tertinggi adalah masukan saran dari masyarakat membantu Pemda mengatasi masalah pengelolaan anggaran yaitu sebesar 0.859. Pada variabel transparansi, indikator dengan nilai loading factor tertinggi adalah bahwa laporan keuangan dinas disajikan rutin dan dapat diakses masyarakat yaitu sebesar 0.873. Selanjutnya, pada variabel Akuntabilitas, indikator dengan nilai loading factor tertinggi adalah bahwa evaluasi program rutin memastikan efisiensi biaya dan pencapaian target dengan nilai 0.839. Sementara itu, untuk variabel Kinerja Keuangan, indikator dengan nilai loading factor tertinggi adalah bahwa dinas mengalokasikan anggaran merata untuk sektor atau kelompok masyarakat yang membutuhkan sebesar 0.874.

Berdasarkan hasil pengujian outer model, seluruh indikator pada variabel partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan memiliki nilai outer loading di atas 0,70, serta nilai Average Variance Extracted (AVE) masing-masing lebih dari 0,50, yang menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi syarat validitas konvergen. Nilai loading tertinggi terdapat pada indikator P.6 (0,859) untuk partisipasi, T.4 (0,873) untuk transparansi, A.6 (0,839) untuk akuntabilitas, dan KK.7 (0,889) untuk kinerja keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruknya dengan baik. Dengan tingkat signifikansi statistik  $Z\alpha = 0,05$  ( $Z = 1,96$ ), seluruh indikator dinyatakan valid secara statistik dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis berikutnya.

Selanjutnya, pengujian validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai cross loading, heterotrait-monotrait ratio (HTMT) dan Fornell-Lacker. Adapun nilai cross loading adalah pada tabel 2.

**Tabel 1. Outer Loadings**

Variabel	Item	Outer Loading
Partisipasi (X1)	P.1	0,762
	P.2	0,831
	P.3	0,707
	P.4	0,805
	P.5	0,739
	P.6	0,859
	P.7	0,815
	P.8	0,714
Transparansi (X2)	T.1	0,714
	T.2	0,841
	T.3	0,821
	T.4	0,873
	T.5	0,848
	T.6	0,830
Akuntabilitas (X3)	A.1	0,787
	A.2	0,714
	A.3	0,798
	A.4	0,825
	A.5	0,803
	A.6	0,839
	A.7	0,744
	A.8	0,836
Kinerja Keuangan (Y)	KK.1	0,783
	KK.2	0,816
	KK.3	0,854
	KK.4	0,856
	KK.5	0,862
	KK.6	0,874
	KK.7	0,889
	KK.8	0,775

Sumber: Data Penelitian, 2025

**Tabel 2. Cross Loading**

	Partisipasi (X1)	Transparansi (X2)	Akuntabilitas (X3)	Kinerja Keuangan (Y)
P.1	0.762	0.589	0.617	0.635
P.2	0.831	0.674	0.551	0.658
P.3	0.707	0.598	0.523	0.425
P.4	0.805	0.592	0.535	0.539
P.5	0.739	0.667	0.543	0.484
P.6	0.859	0.731	0.530	0.598
P.7	0.815	0.517	0.602	0.615
P.8	0.714	0.683	0.582	0.583
T.1	0.637	0.714	0.546	0.511
T.2	0.721	0.841	0.542	0.680
T.3	0.647	0.821	0.595	0.597
T.4	0.666	0.873	0.591	0.667
T.5	0.625	0.848	0.508	0.548
T.6	0.677	0.830	0.637	0.689
A.1	0.554	0.605	0.787	0.587
A.2	0.510	0.476	0.714	0.634
A.3	0.630	0.581	0.798	0.557
A.4	0.578	0.574	0.825	0.578
A.5	0.633	0.580	0.803	0.679
A.6	0.516	0.531	0.839	0.630
A.7	0.545	0.551	0.744	0.598
A.8	0.594	0.522	0.836	0.707
KK.1	0.544	0.556	0.725	0.783
KK.2	0.679	0.559	0.687	0.854
KK.3	0.680	0.655	0.716	0.874
KK.4	0.680	0.605	0.688	0.816
KK.5	0.512	0.628	0.632	0.856
KK.6	0.634	0.648	0.645	0.862
KK.7	0.667	0.762	0.656	0.889
KK.8	0.528	0.654	0.523	0.775

Sumber: Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan melalui nilai cross loading, seluruh item pada variabel Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan memiliki nilai > 0,70 dan menunjukkan korelasi tertinggi terhadap variabel yang diukurnya dibanding variabel lain. Hal ini menegaskan bahwa masing-masing indikator mampu membedakan konstruk yang diwakilinya secara baik, sehingga model dinyatakan memenuhi syarat validitas diskriminan.

**Tabel 3. Nilai Heterotrait-monotrait Ratio (HTMT)**

	Partisipasi (X1)	Transparansi (X2)	Akuntabilitas (X3)	Kinerja Keuangan (Y)
P				
T	0.893			
A	0.788	0.765		
KK	0.785	0.813	0.843	

Sumber: Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan dengan pendekatan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), seluruh nilai HTMT antar variabel berada di bawah ambang batas 0,90, yakni KK→P (0,785), KK→T (0,813), KK→A (0,843), A→P (0,788), A→T (0,765), dan T→P (0,893). Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki perbedaan yang jelas satu sama lain, sehingga validitas diskriminan melalui metode HTMT dinyatakan terpenuhi.

**Tabel 4. Nilai Fornell-Larcker**

	P (X1)	T (X2)	A (X3)	KK (Y)
Partisipasi	0.781			
Transparansi	0.806	0.823		
Akuntabilitas	0.719	0.694	0.794	
Kinerja Keuangan	0.736	0.755	0.788	0.839

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil uji Fornell-Larcker pada tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar konstruk memenuhi validitas diskriminan, meskipun terdapat korelasi tinggi antara Partisipasi dan Transparansi. Namun, seluruh nilai HTMT < 0,90, sehingga validitas diskriminan secara keseluruhan tetap terpenuhi dan tiap variabel dapat dibedakan dengan baik dalam model. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya adalah melakukan uji realibilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan dua pengujian yaitu composite reliability > 0.7 dan cronbach's alpha.

**Tabel 5. Nilai Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability
Partisipasi (X1)	0.908	0.914
Transparansi (X2)	0.904	0.911
Akuntabilitas (X3)	0.916	0.918
Kinerja Keuangan (Y)	0.940	0.942

Sumber: Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability untuk keempat variabel berada di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel. Nilai Composite Reliability tertinggi terdapat pada variabel kinerja keuangan (0,942), diikuti akuntabilitas (0,918), partisipasi (0,914), dan transparansi (0,911), sedangkan nilai Cronbach's Alpha juga mendukung reliabilitas dengan kisaran 0,904–0,940.

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel di dalam penelitian. Cara pertama yaitu dengan menggunakan nilai VIF. Berdasarkan tabel 6, nilai VIF untuk keseluruhan indikator dari setiap variabel terbukti memiliki nilai VIF < 5. Hal ini menunjukkan bahwa data dari seluruh indikator variabel tidak terjadi kolinearitas antar konstruk.

**Tabel 6. Nilai VIF**

Indikator	Nilai VIF
P.1	2.269
P.2	2.813
P.3	2.330
P.4	3.187
P.5	1.964
P.6	3.286
P.7	3.600
P.8	2.144
T.1	1.752
T.2	2.491
T.3	2.332
T.4	3.400
T.5	2.768
T.6	2.560
A.1	2.547
A.2	1.717
A.3	3.363
A.4	3.519
A.5	2.291
A.6	2.812
A.7	1.878
A.8	3.039
KK.1	2.243
KK.2	3.557
KK.3	3.546
KK.4	3.003
KK.5	3.247
KK.6	3.679
KK.7	4.360
KK.8	3.078

Sumber: Data Penelitian, 2025

**Tabel 7. Nilai Koefisien Determinasi**

	R-Square	R-Square Adjusted
Kinerja Keuangan (Y)	0.711	0.695

Sumber: Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian inner model, nilai Adjusted R Square sebesar 0,711 menunjukkan bahwa variabel partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas secara simultan memengaruhi kinerja keuangan sebesar 71,1% (kategori sedang), sementara sisanya 28,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji predictive relevance ( $Q^2$ ) digunakan untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi konstruk endogen, di mana nilai  $Q^2 > 0$  menunjukkan relevansi prediktif yang baik. Karena fitur blindfolding tidak tersedia pada SmartPLS versi 4.0.9.2, perhitungan dilakukan manual dengan rumus  $Q^2 = 1 - (1 - R^2)$ , sehingga diperoleh  $Q^2 = 0,711$ . Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik terhadap variabel kinerja keuangan.

Effect size ( $f^2$ ) digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi atau pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen serta untuk mengevaluasi kualitas model pada level struktural. Nilai  $f^2$  membantu mengidentifikasi kekuatan pengaruh setiap variabel bebas secara individual, dengan kategori pengaruh kecil (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35).

**Tabel 8. Nilai F Square**

	Kinerja Keuangan (Y)	Hasil
Partisipasi (X1)	0.025	Pengaruh kecil
Transparansi (X2)	0.108	Pengaruh kecil
Akuntabilitas(X3)	0.328	Pengaruh sedang

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil uji f-square pada tabel 8 menunjukkan bahwa partisipasi dan transparansi berpengaruh kecil terhadap kinerja keuangan, sementara akuntabilitas memiliki pengaruh sedang.

**Tabel 9. Uji Hipotesis Pengaruh Langsung**

Hipotesis	Path Coefficient	T-statistic	P-value	Keterangan
H1. P → KK	0.155	1.057	0.290	Ditolak
H1. T → KK	0.310	2.242	0.025	Diterima
H2. A → KK	0.461	3.344	0.001	Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2025

Dari keseluruhan pengujian hipotesis melalui bootstrapping, dapat disimpulkan bahwa hubungan partisipasi terhadap kinerja keuangan tidak signifikan, sedangkan transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan.

**Tabel 10. Model Fit**

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.078	0.078
d-ULS	2.477	2.477
d-G	3.098	3.098
Chi-square	709.676	709.676
NFI	0.608	0.608

Sumber: Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian model fit di tabel 10, nilai SRMR sebesar 0,078 berada di bawah ambang batas 0,08, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang dapat diterima (acceptable fit) sesuai dengan kriteria Hair et al. (2018). Sementara itu, nilai NFI sebesar 0,608 menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan sebesar 60,8%. Meskipun belum mencapai nilai ideal (>0,90), angka tersebut tetap menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang cukup dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SmartPLS, menunjukkan bahwa partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dan hipotesis H1 ditolak. Data ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi publik memiliki arah hubungan yang positif, namun kontribusinya belum cukup kuat untuk berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat belum terlaksana secara efektif, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi anggaran, dan kurangnya kapasitas masyarakat untuk terlibat secara substantif dalam pengambilan keputusan keuangan daerah. Hal ini selaras dengan temuan (Saragih & Alpi, 2023) yang menyatakan bahwa lemahnya partisipasi publik berdampak pada rendahnya efisiensi dan akuntabilitas fiskal, serta diperkuat oleh (Anggreani, 2023) yang menyoroti dominasi birokrasi dalam proses perencanaan anggaran sebagai penghambat partisipasi yang bermakna.

Dalam kerangka Teori Keagenan, partisipasi seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat terhadap tindakan agen (pemerintah). Namun, asimetri informasi yang tinggi membuat mekanisme kontrol tersebut tidak berjalan optimal. Ketika informasi tidak tersampaikan secara merata dan partisipasi bersifat formalitas, maka efektivitasnya terhadap peningkatan kinerja keuangan menjadi lemah. Meski demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Yanti et al. (2023) yang menemukan bahwa di beberapa daerah, mekanisme partisipatif seperti e-budgeting dan forum musrenbang yang berbasis komunitas telah berhasil meningkatkan efisiensi fiskal. Perbedaan konteks sosial dan tingkat adopsi teknologi antardaerah menjadi salah satu alasan mengapa pengaruh partisipasi terhadap kinerja keuangan bersifat kontekstual.

Hasil pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis H2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis H2 diterima. Data ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin besar peluang untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa akses terbuka terhadap informasi fiskal meningkatkan efisiensi, memperkuat kepercayaan publik, dan memfasilitasi pengawasan sosial, yang pada akhirnya mendorong

penggunaan anggaran yang lebih bertanggung jawab. Dalam perspektif Teori Keagenan, transparansi merupakan sarana penting untuk meminimalkan asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah, serta untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh agen. (Astuti et al., 2024) menekankan bahwa keterbukaan anggaran yang disertai dengan pelaporan yang dapat diakses publik mendorong peningkatan efisiensi dan akuntabilitas fiskal. Selaras dengan itu, (Rahma et al., 2023) menjelaskan bahwa transparansi mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga meningkatkan tekanan sosial terhadap pemerintah untuk mengelola anggaran secara lebih bijak. Namun demikian, perlu dicatat bahwa (Pera et al., 2024) menemukan bahwa di beberapa wilayah, transparansi belum berdampak signifikan terhadap kinerja karena informasi yang tersedia belum digunakan secara aktif oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi harus diiringi dengan literasi publik dan sistem umpan balik yang kuat agar pengaruhnya terhadap kinerja benar-benar nyata.

Pada pengujian variabel akuntabilitas, menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis H3 diterima. Akuntabilitas merupakan variabel dengan pengaruh paling kuat dibandingkan variabel lainnya, yang menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban publik berperan penting dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks Teori Keagenan, akuntabilitas berperan mengurangi asimetri informasi melalui pelaporan yang transparan dan dapat diverifikasi, sehingga agen (pemerintah) terdorong untuk menjalankan tugasnya sesuai mandat publik. (Pera et al., 2024) menegaskan bahwa pelaporan berkala yang akuntabel mampu menekan potensi penyimpangan anggaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. (Merchilia & Robinson, 2024) juga menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi mendorong pelaksanaan program secara tepat sasaran dan mengurangi moral hazard dalam proses anggaran. Hasil ini memperkuat argumen bahwa akuntabilitas bukan hanya aspek administratif, tetapi juga fondasi utama dalam membangun sistem pengelolaan keuangan publik yang sehat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas pelaporan dan mekanisme evaluasi publik perlu menjadi prioritas untuk memperkuat dampak positif akuntabilitas terhadap kinerja keuangan di masa mendatang.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel partisipasi masyarakat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, mengindikasikan bahwa keterlibatan publik dalam proses pengelolaan anggaran belum cukup efektif untuk mendorong pencapaian kinerja fiskal yang optimal. Sebaliknya, transparansi dan akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Transparansi membuka akses informasi dan meningkatkan pengawasan publik, sementara akuntabilitas mendorong efisiensi serta pertanggungjawaban yang lebih kuat dalam pelaksanaan anggaran.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik dari sisi akademik maupun praktik kebijakan. Secara ilmiah, studi ini memperkaya pemahaman mengenai pengaruh tata kelola yang baik terhadap kinerja keuangan di sektor publik, khususnya pada instansi pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menyusun strategi perbaikan tata kelola anggaran melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta meninjau kembali efektivitas mekanisme partisipasi publik yang selama ini digunakan. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan ketiga dimensi tata kelola publik dalam satu model analisis, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong kinerja keuangan pemerintah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya ruang lingkup sampel yang terbatas hanya pada tiga instansi pemerintah daerah dalam satu wilayah kota, serta tidak

mempertimbangkan variabel-variabel eksternal seperti kapasitas SDM, politik anggaran, atau sistem informasi keuangan yang juga berpotensi memengaruhi kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan institusi dan wilayah, serta mengembangkan model dengan memasukkan variabel tambahan agar hasilnya lebih holistik. Selain itu, pendekatan kualitatif atau mixed-method dapat digunakan untuk menggali dimensi-dimensi partisipasi publik secara lebih mendalam, terutama terkait kualitas dan bentuk partisipasi yang efektif dalam meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah.

## Referensi

- Anggreani, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Kapasitas Aparatur Terhadap Kinerja Keuangan Desa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Bpkad Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 10(1), 12.
- Indriana, & Nasrun. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 19-26.
- Khusaini, N. (2019). Penganggaran Sektor Publik. UB Press.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor publik. Penerbit Andi.
- Merchilia, S., & Robinson. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5326-5338. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1134>
- Moediono. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Dinas yang Berada di Mall Pelayanan Publik Siola Kota Surabaya. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Pera, Lomi, & Kiak. (2024). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 299-304. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/glory.v5i2.13057>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006>
- Rahma, Y., Nurlailah, Apriani, N., & Fitrianiingsih, S. (2023). View of Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.pdf. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6, 1975-1982. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4586>
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabiilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1-10.
- Sari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Surabaya. STIE Perbanas Surabaya.
- Simorangkir, defleida sary. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan". 1-105.
- Utami, H. R. (2023). Pengaruh Budgetary Goal Characteristics, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. UPN Veteran Jawa Timur.